

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan tentang keberhasilan apakah tujuan akan tercapai atau tidak, jika hasil kegiatan mendekati tujuan, itu berarti efektivitas yang makin tinggi. Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh instansi. Efisiensi adalah nilai suatu operasi yang menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan, atau setidaknya operasi itu berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan (Siagian 2008).

Efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan (Wiyono 2007).

Penilaian efektivitas ini dapat menjadi hasil akhir terkait kelanjutan program, dalam mengukur tingkat efektivitas, teori yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu teori dari Sutrisno (2007) yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Indonesia adalah negara dengan peningkatan pertumbuhan dengan penduduk setiap tahunnya semakin tinggi dengan keberagaman latar belakang.

Salah satunya adalah pada bidang administrasi kependudukan yang merupakan kegiatan-kegiatan dalam melakukan penerbitan dan penataan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi penduduk, pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, serta pemanfaatan atas hasil pembangunan sektor lain dan pelayanan publik.

Fenomena tersebut menjadi perhatian Indonesia sebagai salah satu negara terbanyak keempat didunia setelah negara Cina, India dan Amerika Serikat. Pada pendataan penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 282.477.584 juta jiwa per 9 Februari 2025.

Salah satu bentuk pemerintah untuk melindungi, mensejahterakan, dan mengawasi penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dibidang administrasi kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Persyaratan dan tata cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Melalui efektivitas ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan publik, hak-hak dasar, dan perlindungan dari eksploitasi serta kekerasan.

Dengan demikian, implementasi peraturan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak merupakan Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah menerbitkan program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (KISANAK), yaitu Pembuatan KIA melalui Kerja sama dengan Sekolah Anak. Kisanak merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk mempercepat penerbitan Kartu Identitas Anak secara bersama-sama di sekolah-sekolah melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Pada tahun 2024, sebanyak 22 sekolah dengan jumlah siswa 1.769 termasuk TK 117 siswa, SD 889 siswa, dan SMP negeri 410 siswa serta SMP swasta 353 siswa di kota Bandung dan total 1.769 KIA tercetak. Program Kisanak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dirancang untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang berkeinginan membuat kartu identitas anak. Tujuan utamanya adalah memberikan identitas resmi kepada anak-anak melalui kerja sama antara sekolah dan instansi terkait. Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pendataan penduduk anak-anak menjadi lebih mudah, sementara anak-anak

mendapatkan hak-hak mereka dengan mendapatkan fasilitas dari Kartu Identitas Anak.

Selain berperan sebagai inisiatif pemerintah untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak identitas anak sesuai ketentuan undang-undang, dengan memiliki manfaat luas dalam berbagai aspek praktis. Dalam upaya memaksimalkan manfaatnya, maka Disdukcapil Kota Bandung sudah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memberikan layanan kepada anak-anak, seperti bimbingan belajar, toko buku, rumah makan, mall, tempat bermain anak, toko pakaian, dan waterpark, dengan kesepakatan bahwa anak/keluarga pemegang KIA mendapatkan potongan harga apabila melakukan transaksi dengan berbagai mitra tersebut.

Meskipun program kartu identitas anak telah dimulai sejak tahun 2016, namun program KISANAK yang menjadi bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru diinisiasi pada akhir tahun 2022. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa program ini masih dalam tahap awal dalam memberikan fasilitasi kepada sekolah-sekolah terkait pembuatan kartu identitas anak.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu terkait efektivitas program Selesai Dalam Genggaman (salaman) Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Fefie Anggraeni 2022), dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan secara online masih mengalami hambatan yang disebabkan oleh pengetahuan serta pola pikir masyarakat yang menganggap pelayanan secara online sulit dan rumit sehingga masyarakat lebih melakukan pelayanan secara offline. Sehingga

efektivitas program tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan masih adanya berita palsu yang membingungkan masyarakat terkait kartu identitas anak.

Setiap awal tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan selanjutnya bertanggung jawab untuk mensosialisasikan informasi tersebut kepada sekolah-sekolah melalui grup sekolah. Sosialisasi ini mencakup prosedur pendaftaran pembuatan Kartu Identitas Anak melalui program KISANAK. Sebagai hasilnya, banyak pihak sekolah yang mendaftar dengan mengirimkan data siswa melalui media penyimpanan dalam bentuk *CD/flashdisk*. Lalu untuk penyerahannya dilakukan oleh guru atau perwakilan sekolah dengan membawa Surat Pengantar kepada DISDUKCAPIL Kota Bandung melalui Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk diproses lebih lanjut. Adapun persyaratan yang dipersiapkan yaitu Kartu Keluarga (KK) asli orang tua, Akta Kelahiran, Pas Foto berwarna ukuran 2x3 dan Nomor Hp/Email, yang peneliti ambil berfokus pada 2 sekolah di kecamatan batununggal yaitu SMPN 4 Bandung dengan jumlah permohonan 94 siswa dan SMP YPU dengan jumlah permohonan 47 siswa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Informasi program KISANAK dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak tersampaikan dengan baik, dan belum dilaksanakan dengan efektif.
2. Kendala lainnya yaitu dalam pencapaian target program kisanak belum tercapai disebabkan karena sasaran tahun ini dari Bulan Januari-Desember

baru naik 1% yang seharusnya sudah 4% karena difokuskan untuk pembuatan E-KTP disebabkan adanya pemilu yaitu pilpres dan pilkada 2024.

3. Untuk proses pembuatan kartu identitas anak memakan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 2 minggu sampai dengan 3 bulan tergantung dari banyaknya jumlah respon balik pihak sekolah.
4. Tercapainya Tujuan program KISANAK dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat masalah atau hambatan bagi pihak sekolah dalam mensosialisasikan informasi tersebut kepada wali murid melalui grup sekolah dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.
5. Program KISANAK belum dapat dikatakan efektif karena keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk mendukung pembuatan Kartu Identitas Anak, sehingga dapat menghambat perubahan nyata bagi pengembangan data kependudukan.

Untuk memastikan bahwa semua sekolah-sekolah anak di Kota Bandung menerima dan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program KISANAK, tentu menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama dengan Kerja sama Dinas Pendidikan. Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (Kisanak) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Studi Kasus : Di SMP Kecamatan Batununggal)”**.

Alasan penulis memilih judul diatas karena Program KISANAK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepemilikan

dokumen identitas sejak usia dini, dan fokus pada kecamatan batununggal memberi ruang bagi penelitian studi kasus yang mendalam, serta menyoroti implementasi program secara lebih spesifik di wilayah perkotaan dengan karakteristik tertentu.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terkait dengan efektivitas program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (KISANAK) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan efektivitas program berdasarkan indikator menurut Sutrisno (2007) yaitu: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (KISANAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Efektivitas Program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (KISANAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (KISANAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (KISANAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Efektivitas Program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (KISANAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?
3. Untuk mengetahui solusi apa saja yang menjadi hambatan dalam Efektivitas Program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (KISANAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### 1) Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat memperdalam pengetahuan dan menambang pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik khususnya menyangkut dengan efektivitas program kisanak di dalam suatu instansi agar berjalan dengan efektif.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan dalam pengembangan teori-teori yang sesuai dengan efektivitas program kisanak.

##### 2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam memecahkan hak serupa dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian pada

masa yang akan datang serta diharapkan memberikan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dan pihak lain agar efektivitas program kisanak tersusun dengan baik.

### 3) Kegunaan Bagi Peneliti

Untuk menambah memperdalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pelayanan publik berbasis kolaborasi dan peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori tentang efektivitas program, evaluasi kebijakan, dan manajemen pelayanan publik ke dalam konteks nyata di lapangan melalui studi kasus.